

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan suatu analisa yang menggambarkan realita atau fakta-fakta dari sifat populasi, yang menitikberatkan pada data (Arifin: Jurnal sosial – politik). Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dijelaskan dan kemudian dianalisis. Pelaksanaan Penelitian-penelitian deskriptif ini tidak hanya terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, namun data yang diperoleh kemudian dipaparkan, dan penulis melakukan interpretasi data untuk mendapatkan pemahaman yang mamadai (Surakhmad, 1999) dalam Afi (2002:5).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinamika Pendapatan Asli Daerah Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Probolinggo pada era otonomi daerah yaitu sebelum adanya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yaitu tahun 1997-1998 dibanding dengan setelah diundangkannya yaitu pada tahun 1999-2007.

3.1.3 Populasi

Populasi penelitian ini diambil sebelum dilaksanakannya otonomi daerah yaitu pada tahun 1997-1998 dibanding dengan setelah diundangkannya yaitu pada tahun 1999-2007. Tahun tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa otonomi daerah sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Probolinggo.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indriantoro, 1999:147). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang penerimaan dan pengeluaran daerah sebelum otonomi daerah yaitu pada tahun 1997-1998 dan setelah otonomi daerah yaitu pada tahun 1999-2007.

Data tersebut diperoleh dari berbagai instansi yang terdapat di wilayah Kota Probolinggo seperti Bappeda Kota Probolinggo, Kantor BPS Kota Probolinggo, dan Kantor Pelayanan PBB Kota Probolinggo.

3.3. Metode Analisis Data

1. Struktur penerimaan PAD dianalisis dengan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD (Kuncoro, 1997 : 13), dengan formula sebagai berikut :

$$KSPAD = \frac{SPAD}{PAD} \times 100\%$$

Di mana : KSPAD : Kontribusi sumber PAD

SPAD : Sumber-sumber PAD

PAD : Total PAD

2. Menghitung laju pertumbuhan PAD dan sumber-sumber PAD (Widodo, 1990 : 36), dengan formula sebagai berikut :

$$r = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana : r : Laju pertumbuhan

PAD t : Jumlah PAD pada tahun t

PAD t-1 : Jumlah PAD pada tahun sebelumnya

3. Mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF) atau tingkat kemampuan daerah dengan menggunakan rasio antara PAD terhadap total penerimaan daerah (Kuncoro, 1995 : 9), dengan formula sebagai berikut :

$$TKKD = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Di mana : TKKD : Tingkat kemampuan keuangan daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total penerimaan daerah

Menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM, dengan menggunakan skala Derajat Otonomi Fiskal pada Tabel 3.1, maka dapat diketahui tingkat kemampuan suatu daerah (Sulfiana 2009:26)

Tabel 3.1 Skala Derajat Otonomi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,01	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Wulandari dalam (Sulfiana 2009:26)

4. Mengukur tingkat kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin (Tumilar 1997 : 38), dengan formula sebagai berikut :

$$KRD = \frac{TPAD}{TPRD} \times 100\%$$

Di mana : KRD : Kemampuan rutin daerah

TPAD : Total Pendapatan Asli Daerah

TPRD : Total pengeluaran rutin daerah

Indek Kemampuan Rutin (IKR) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan paling minimal melalui PAD yang diperoleh. Apabila angka IKR $\geq 100\%$ maka pendapatan yang diperoleh dapat membiayai kebutuhan pengeluaran rutin daerah

tersebut. Sedangkan apabila angka IKR < 100% maka PAD tidak dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah yang bersangkutan.

5. Mengukur kinerja administrasi penerimaan PAD (PAU-SE UGM, 2000 : 21-24), dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Effisiensi} = \frac{\text{Biaya Pengumpulan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sebagai ukurannya yaitu apabila realisasi PAD lebih besar dari target PAD atau potensi PAD atau Biaya Pengumpulan PAD maka dikatakan bahwa kinerja administrasi penerimaan PAD suatu daerah baik.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diamati, antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah jumlah keseluruhan penerimaan daerah yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak-Bukan Pajak, Sumbangan & Bantuan, dan Penerimaan Pembangunan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Total Pengeluaran Rutin Daerah (TPRD) adalah jumlah keseluruhan pengeluaran rutin daerah di luar belanja pegawai yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

5. Biaya pengumpulan PAD adalah segala biaya yang digunakan untuk pengumpulan PAD. *Proxy* dari biaya ini adalah seluruh biaya rutin Dinas Pendapatan Daerah yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
6. Kemandirian Fiskal adalah kemandirian dalam seluruh pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah.